

INTISARI

Prosedur penerimaan PBB yang efektif dan efisien merupakan salah satu penunjang untuk meningkatkan pendapatan PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pendekatan *lean government* dan menggunakan metode *walkthrough*. Evaluasi ditinjau dari adanya 8 *waste* yang disebut dengan DOWNTIME yaitu: (1) *defect*, (2) *overproduction*, (3) *waiting*, (4) *non-utilizing knowledge*, (5) *transportation*, (6) *inventory*, (7) *motion*, (8) *excess processing*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tingkat *lean* yang baik karena hanya terdapat 3 *waste* dari 8 *waste* yang di evaluasi. Tiga *waste* tersebut adalah *defect* yaitu ketidaksesuaian alur pada SOP dan risiko kehilangan SPPT di Kelurahan, *waiting* yaitu ketidaksesuaian waktu pada SOP dan waktu distribusi dari BPKAD ke Kelurahan, serta *motion* yaitu ketidaktahuan masyarakat terkait persyaratan penyelesaian masalah PBB. Maka, penulis memberikan saran untuk memperbarui SOP, memberi sosialisasi kepada kelurahan dan masyarakat, serta memperbaiki prosedur PBB di kelurahan.

Kata Kunci: evaluasi, *lean government*, *waste*, penerimaan PBB, BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRACT

The one of supports to increase land and building tax is having an effective and efficient admission procedure. This study is aimed to evaluate the Standard Operating Procedure (SOP) on Land and Building Tax reception at Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Yogyakarta by lean government approach and walkthrough method. The evaluation is assessed through the 8 wastes which are called as the DOWNTIME. They are elaborated as follows: (1) defect, (2) overproduction, (3) waiting, (4) non-utilizing knowledge, (5) transportation, (6) inventory, (7) motion, (8) excess processing. According to the result of this study, BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta posses a good lean hierarchy as there are only 3 wastes exist out of 8 wastes referred to the assessment. Those three wastes are defects as the village, then waiting as the time discrepancy on SOP's time and distribution's time from BPKAD to the urban village, and also motion as the people lack of understanding towards land and building tax problem solving requirements. Therefore, the writer suggests to create SOP renewal, provide the information fot urban village and people, and also improve land and building tax procedures in urban village.

Keywords: evaluation, lean government, waste, Land and Building tax reception, BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta